



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN
NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN**

TESIS

**DION RIZKIAN, S.H.
0806426686**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN
NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**DION RIZKIAN, S.H.
0806426686**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Dion Rizkian, S.H.
NPM : 0806426686
Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dion Rizkian, S.H.
NPM : 0806426686
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tanggung Jawab Notaris Sebagai Saksi Di Pengadilan Terhadap Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Mengenai Pemanggilan Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.

Penguji : Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.Kn.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesisi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu DR. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku dewan penguji pada sidang tesis saya;
- (3) Ibu Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.Kn, selaku dewan penguji pada sidang tesis saya;
- (4) Pihak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (5) Papa Asman Manaf dan Mama Gayatri , Kakak Alan Perdana, Adik Seres Triola dan Haves serta Dzakiy, dan Adik Dinda Aprilia dan Khomeini serta Queensha yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral,; dan
- (6) Sahabat mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas angkatan 2008 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 30 Juni 2010

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dion Rizkian, S.H.
NPM : 0806426686
Program Studi: Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Pertanggung Jawaban Notaris Sebagai Saksi Di Pengadilan”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Juni 2010
Yang menyatakan

(Dion Rizkian, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Dion Rizkian
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Pertanggung Jawaban
Notaris Sebagai Saksi Di Pengadilan

Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris sehubungan dengan tindakan Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan suatu kewajiban karena dengan jelas diatur dalam Undang-Undang. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana ternyata menurut penelitian terdapat perbedaan dalam pengaturannya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat dipandang memperlemah pelaksanaan Pasal 66 karena jangka waktu pemberian persetujuan sejak diterimanya permohonan untuk Majelis Pengawas Daerah itu menjadi kendala bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci :
Notaris, Tanggung Jawab, Saksi.

ABSTRACT

Name : DION RIZKIAN, S.H.
Study Program : Master Program of Notary
Title : Implementation of Article 66 of Notary Function Act No. 30/2004 about Notary Function Regarding to Notary Responsibilities as Witness in a Court.

This thesis aimed to review all implementation aspects of Article 66 of Act No. 30/2004 about Notary Function regarding to their responsibilities as witness in a court where concerned on duty and authorities of all their law action uses liability based on fault principle. This principle means there is any notary responsibilities on common principle of criminal and civil laws where become witness is a mandatory and also ruled by Minister of Law and Human Rights Ordinance No. M.03.HT.03.10/2007. Conclusion of this thesis explains that above stated Minister of Law and Human Rights Ordinance could be diluting effectiveness of Article 66 implementation regarding in any time delays to approval for Local Supervision Board (MPD) starting their jobs.

Keywords: Notary, Responsibility, Witness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	11
1.3. Metode Penelitian.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
2. PENERAPAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN.....	15
2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	15
2.1.1. Pengertian Notaris.....	15
2.1.2. Sejarah Profesi Notaris	17
2.1.3. Pengertian, Tugas dan Wewenang Notaris.....	20
2.1.4. Kedudukan Kode Etik dalam Menjalankan Profesi Hukum Sebagai Notaris.....	30
2.2. Notaris sebagai Saksi dalam Peradilan Perdata.....	47
2.2.1. Saksi dalam Peradilan Perdata	47
2.2.2. Saksi dalam Peradilan Pidana	49
2.3. Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Otentik.....	52
2.4. Tinjauan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.....	58
2.4.1. Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.....	58
2.4.2. Keputusan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi.....	62
2.4.3. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.....	69
2.5. Analisis Penerapan Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Menurut Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.....	71
2.5.1. Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Kasus.....	71
2.5.2. Analisis Penerapan Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi.....	72
3. PENUTUP.....	76
3.1. Simpulan.....	76
3.2. Saran.....	77
DAFTAR REFERENSI.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor Pol. B/1056/V/2006 dan Nomor 01/MOU/PP-INI/2006 dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor Pol. B/1055/V/2006 dan Nomor 05/PP-IPPAT/V/2006

Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Utara Nomor: 20/PP/MPD.JU/05/2008

Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru Nomor: W4.MPDN.07.01-192

Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Utara Nomor: 33/PP/MPD.JU/09/2008